

Pemkab Gunungkidul Dapatkan Predikat WTP Pertama Kalinya



Ilustrasi : www.tanjungpinangpos.co.id

Jogja.uri.co.id, GUNUNGKIDUL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)¹⁾ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat penilaian yang didapatkan pertama kali ini diharapkan dapat membawa dampak baik untuk kinerja pemerintahan.

“Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras dari semua pihak. Untuk pertama kalinya, Gunungkidul mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI, ini merupakan sebuah kebanggaan, dan pekerjaan rumah buat kami untuk dapat terus mempertahankannya,” ujar Bupati Gunungkidul, Badingah, Senin (30/5/2016).

Badingah mengatakan, raihan WTP ini dapat menjadi cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk terus bekerja keras dalam mempertahankan laporan keuangan dan akuntabilitas daerah secara baik dan benar.

Ia berharap, hasil ini bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. “Meski ada catatan kecil namun kita yakin mampu menyelesaikan,” katanya.

Pejabat Sekeretasi Daerah (Sekda) Gunungkidul, Supartono, mengatakan, beberapa catatan yang disisipkan BPK untuk diperhatikan kembali antara lain segi pengelolaan aset²⁾, dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)³⁾ agar semakin baik kedepannya.

Ia mengakui dalam menyelesaikan temuan BPK ada kendala tentang perubahan tatanan dari Kas Basis ke aktual basis. Kesulitannya karena ada beberapa variabel yang berbeda dalam pengelolaan catatan tersebut.

“Kami akan segera menindaklanjuti beberapa catatan tersebut,”katanya. Penilaian WTP ini diserahkan di Kantor BPK Yogyakarta, Senin pagi (30/5/2016) tadi.

Gunungkidul tahun 2016 ini mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) audit dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2015 lalu.

Sumber Berita :

1. <https://jogja.uri.co.id>, Senin Tanggal 30 Mei 2016; Pemkab Gunungkidul Dapatkan Predikat WTP Pertama kalinya.
2. Harian Jogja, Senin Tanggal 30 Mei 2016; Keuangan Daerah, Pertama kalinya Gunungkidul dapat Predikat WTP.
3. www.sorotgunungkidul.com, Selasa Tanggal 31 Mei 2016; Pemkab Gunungkidul akhirnya raih WTP dari BPK RI
4. Tribun Jogja, Senin Tanggal 30 Mei 2016; Pemkab Gunungkidul dapatkan Predikat WTP pertama kalinya.

Catatan:

1. Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan antara lain disebutkan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; dan ayat (3) juga disebutkan Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Pasal 7 ayat (1) disebutkan BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
- 2) Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.
- 3) Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.